

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Peran

Peran adalah kata kerja yang merupakan kata dasar dari kata “ Peranan” Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1999: 751) Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Terminologi ilmu sosial dan politik kata ini diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Taneko (1986: 23) menyatakan yang di maksud peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika peran dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti sekelompok orang atau organisasi berarti seperangkat tingkah laku dari kelompok tertentu yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Menurut Sugiyono (2002:72) peranan lembaga mencakup sumber daya berupa pengadaan dan pengelolaan masukan-masukan keuangan yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan lembaga. Menurut Syani (2007 : 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dikatakan telah berperan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

status sosialnya dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2002: 243) memberikan arti peranan sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan paling sedikit mencakup tiga hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam skripsi ini, penulis ingin memaknai peran yang digunakan dalam penelitian yaitu peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan dalam struktur masyarakat harus mampu mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, seseorang itu diharapkan dapat menyesuaikan dirinya agar masyarakat melihat bahwa seseorang yang mempunyai peran dapat membimbing masyarakat tanpa mencari keuntungan semata dan imbalan. Seseorang yang mempunyai peran bekerja hanya untuk memberikan pelayanan dan dapat membangun komunikasi dengan saling menghormati harga diri masyarakat.

Berdasarkan Pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan peran adalah kegiatan individu, elite, lembaga atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu, melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau status sosialnya sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat.

B. Tinjauan Pekerja Sosial

Menurut Suharto (2005:93) Pekerja sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip keberhasilan pekerja sosial, yaitu membantu orang agar mampu membangun dirinya sendiri. Peran seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (*Problem solver*) secara langsung, oleh karena itu pekerja sosial sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan dalam pemberdayaan.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI (2009:6) yang dimaksud pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk bekerja sama dengan KUBE fakir miskin dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut. Departemen Sosial RI (2009:79) hakekat Pendampingan sosial merupakan kata benda yang berasal dari *damping*, yang artinya dekat, karib, rapat. Jadi, pendampingan dapat diartikan sebagai proses pendekatan sehingga menjadi karib dan akrab.

Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE, LKM- KUBE, dan masyarakat sekitarnya. Dalam rangka memecahkan masalah, mempererat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. KUBE sebagai kelompok dari keluarga-keluarga fakir miskin membutuhkan pendampingan dari orang yang lebih tahu dan lebih terampil daripada mereka. KUBE di dalam melaksanakan usaha sosial-ekonomisnya, sering dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah, sehingga membutuhkan orang yang ahli, namun orang tersebut harus dekat secara fisik, sosial, dan emosional dengan mereka.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan pendamping sosial adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan (*skill*) khusus dibidangnya sendiri sehingga dapat bekerja sama dengan KUBE fakir miskin karena kedekatan secara fisik, sosial dan emosional.

1. Tujuan Pendampingan Pekerja sosial

Tujuan umum pendampingan sosial adalah meningkatkan motivasi, kemampuan, peran para anggota KUBE atau LKM-KUBE dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan anggotanya. Adapun tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatnya kemampuan KUBE dalam menemukan masalah, potensi para anggota dan sumber daya sosial ekonomi yang ada di lingkungannya.
- b. Meningkatnya kemampuan KUBE dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah dan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatnya akses para anggota KUBE terhadap lapangan kerja, pelayanan sosial dasar, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
- d. Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga fakir miskin (sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi lingkungan, serta kebutuhan dasar lainnya.
- e. Meningkatnya kemampuan KUBE dalam mempertanggung-jawabkan kegiatan usaha ekonomi dan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Unsur-Unsur Pendampingan

- a. Tokoh lokal, yaitu pemimpin lokal yang bertindak untuk menggerakkan dan mendayagunakan potensi KUBE. Pemimpin lokal ini bisa tokoh agama, pekerja sosial, pemimpin formal maupun informal.
- b. Kelompok swadaya masyarakat, dalam hal ini adalah KUBE yang akan menjadi sasaran sekaligus pelaku.
- c. Dana masyarakat (keswasembadaan)
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekitar lingkungan.

- e. Pengetahuan dan kearifan lokal, artinya pendampingan perlu memperhatikan keunikan lokal.
- f. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan, termasuk didalamnya penggunaan teknologi tepat guna.
- g. Mitra usaha nasional dan lokal/ setempat yang dapat diajak ikut serta dalam memberikan jaminan lapangan kerja, pendampingan usaha ekonomi, bimbingan teknis, akses pasar, jaminan sosial, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pendampingan sosial, pendamping sosial senantiasa berinteraksi dan bermitra kerja (*partnership*) dengan berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/LSM lokal, yang diutamakan berasal dan hidup serta bekerja dari lingkungan tempat KUBE fakir miskin berada.
2. Konsultan teknis, yaitu petugas, pengurus orsos, seseorang yang dengan kemampuannya dapat dijadikan konsultasi teknis kepada pendamping sosial KUBE.
3. Lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi non pemerintah/ organisasi sosial/ swadaya masyarakat/ forum-forum masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan informasi antar KUBE, sarana kerjasama, sarana untuk menjembatani antara KUBE dengan pemilik sumber.

4. Pemilik sumber, yaitu berbagai jaringan kerja, yang berupa lembaga/ badan/ instansi/ perorangan yang diperkirakan dapat memberikan system dukungan terhadap pelaksanaan pendampingan sosial KUBE fakir miskin.

3. Lingkup Pendampingan Pekerja Sosial

Lingkup pendampingan Sosial dikaitkan dengan proses pembentukan dan pengembangan KUBE, yaitu :

1. Tahap persiapan, meliputi :
 - a. Orientasi dan observasi, yang ditujukan untuk mengetahui secara garis besar suatu lingkungan (calon lokasi) penduduk dengan berbagai permasalahan sosial, kebutuhannya dan sumber potensi desa yang mungkin mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - b. Registrasi dan identifikasi, tujuannya mengetahui gambaran nyata, latar belakang daerah dan jenis kebutuhan masyarakat daerah tersebut.
 - c. Perencanaan program, yaitu menetapkan tujuan yang hendak dicapai guna mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan menemukan calon sasaran KBS.
 - d. Penyuluhan sosial umum ditujukan untuk memberikan penyadaran dan pengertian tentang permasalahan yang mereka hadapi dan memecahkan masalah mereka baik material, sosial, emosional, spiritual, dan intelektual.

- e. Bimbingan pengenalan masalah, ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan calon keluarga KBS dalam menghadapi masalah.
 - f. Bimbingan motivasi sosial, ditujukan untuk membangkitkan niat berusaha dan mengatasi masalah sosial yang dihadapi serta memilih pemecahan masalah.
 - g. Penilaian dan analisis, ditujukan untuk mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan pada tahap persiapan (prakondisi) sehingga hasil penilaian ini dapat digunakan untuk tahap selanjutnya.
2. Tahap Pelaksanaan pemberi bantuan stimulan UEP, meliputi :
- a. Seleksi Calon Keluarga Binaan (KBS), ditujukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang calon KBS kemudian di kualifikasi dan kuantifikasi.
 - b. Diskusi penentuan jenis usaha, ditujukan untuk menggali harapan calon KBS, sesuai kebutuhan nyata mereka untuk mengelola suatu jenis usaha yang cocok dan sesuai kemampuan dan SDA disekitarnya.
 - c. Latihan keterampilan berusaha, yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik teori maupun praktek sehingga dapat mengelola jenis usaha UEP.
 - d. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin sesuai keterampilan usahanya.

- e. Pemberian bantuan santunan hidup artinya keluarga anggota KUBE agar memiliki kondisi fisik dan kesehatan baik selama mengikuti pelatihan.
 - f. Pemberian modal usaha ekonomi produktif (UEP) berupa bantuan stimulan modal usaha.
 - g. Pemberian bantuan bahan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
 - h. Peningkatan kemampuan KUBE dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Tahap bimbingan usaha Kelompok meliputi :
- a. Bimbingan menabung dan mendapatkan kredit.
 - b. Bimbingan pemupukan modal usaha agar usahanya semakin berkembang.
 - c. Bimbingan pemasaran, agar KUBE mampu memasarkan UEP nya.
 - d. Bimbingan kerjasama antar kelompok, ditujukan untuk pemecahan masalah permodalan.
 - e. Evaluasi, ditujukan untuk mengetahui apakah program sudah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, hambatan-hambatannya apa dan bentuk penyimpangan yang terjadi.
4. Tahap Kemitraan Usaha, meliputi :
- a. Inventarisasi/ registrasi, yang ditujukan untuk melakukan kegiatan pencatatan/ inventarisasi berbagai potensi dan sumber yang dapat

mendukung kemitraan usaha baik sumber daya alam, sosial maupun manusia.

- b. Pendataan dan identifikasi, ditujukan untuk mengetahui keberhasilan nyata KUBE yang akan diikuti mitra usaha.
 - c. Seleksi, menetapkan KUBE mana yang berhasil dan pantas mendapat modal pengembangan usaha.
 - d. Bimbingan organisasi kemitraan usaha, yang ditujukan untuk memotivasi anggota KUBE agar lebih mampu mengembangkan usaha maupun meningkatkan penghasilan .
 - e. Pelaksanaan kemitraan usaha, ditujukan untuk persiapan administrasi atau pembuatan proposal.
 - f. Perluasan jaringan kemitraan usaha, yang ditujukan untuk mempermudah KUBE berkembang secara mandiri.
 - g. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang ditujukan untuk memperoleh keterangan bahan tentang tingkat pencapaian sasaran dan tujuan, efektivitas, dan efisiensi, serta nilai-nilai dari pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha.
5. Tahap Monitoring dan evaluasi, meliputi :
- a. Monitoring, yang ditujukan untuk mengetahui sedini mungkin pelaksanaan pendampingan sosial KUBE.

- b. Evaluasi, Ditujukan untuk memberikan penilaian apakah tujuan pendampingan telah tercapai dan apakah indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan telah terpenuhi.

4. Jenis Pekerja Sosial

Menurut Herbert (BIMTEK,2012) pendamping sosial adalah Perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk bekerjasama dengan KUBE dan LKM KUBE Fakir Miskin dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut. Pendamping sosial terdiri dari:

- a. Pendamping sosial Lokal adalah pendamping sosial hasil seleksi dari warga masyarakat dimana Kube FM dilaksanakan.
- b. Pendamping Sosial Profesional adalah hasil seleksi pendamping sosial dari masyarakat umum, baik dari unsur orsos/LSM maupun instansi social

5. Kriteria Integritas Pekerja Sosial :

- a. Berjiwa Sosial, mempunyai hasrat dan tekad yang kuat untuk membantu fakir miskin.
- b. Bermotivasi tinggi,memiliki semangat dan dorongan yang tinggi untuk menyelesaikan tugas yang diembannya.
- c. Bereputasi baik, orang yang dikenal baik oleh masyarakat dan mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.

6. Kriteria Kapasitas Pekerja Sosial Profesional :

- a. Tingkat Pendidikan S1 atau D.IV.
- b. Mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang pembangunan kesos.
- c. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau non formal.
- d. Mempunyai kemampuan manajerial, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kepemimpinan maupun pengontrolan (Monitoring)

7. Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial

- a. Fungsi Administrasi dan Kepemimpinan, dengan tugas – tugas :
 1. Tugas Perencanaan yaitu mampu menyusun rencana kegiatan pendampingan.
 2. Tugas Pencatatan atau pendataan, yaitu mampu mencatat atau mendata masalah dan kebutuhan serta kondisi obyektif yang dihadapi dalam pendampingan.
 3. Tugas Pelaporan dan Dokumentasi, yaitu mampu menyusun laporan terhadap berbagai kegiatan pendampingan.
 4. Tugas Monitoring dan Evaluasi, yaitu melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pendampingan.

b. Fungsi Operasional

Pendampingan sosial menjalankan fungsi yang terkait dengan jalannya kegiatan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tugas – tugas yang harus dijalankan adalah :

1. Tugas Penyuluhan
2. Tugas Penguatan Kapasitas Fakir Miskin
3. Tugas Pelayanan, yaitu dalam memanfaatkan fasilitas umum dan sosial bagi fakir miskin dan masyarakat sekitar.

c. Fungsi Koordinasi dan Kerjasama

Pendamping sosial melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan fakir miskin. Tugas yang harus dilaksanakan :

1. Tugas Kemitraan
yaitu menjalin kerjasama dengan pihak –pihak terkait.
2. Tugas Kemitraan ,
yaitu menjalin kerjasama dengan pihak –pihak terkait.
3. Tugas Aksesibilitas,
yaitu menciptakan suasana yang kondusif dan membuka informasi atau peluang kepada warga FM dampingan.
4. Tugas Rujukan ,
yaitu melaksanakan tugas untuk mengaitkan masyarakat dampingan dengan sistem sumber yang lebih luas.

8. Peran Pendampingan Pekerja sosial

Menurut Buku Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin (DEPSOS RI:93) dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kegiatan pendampingan sosial, para pendamping sosial dapat menjalankan berbagai peran berikut ini :

- a. Perencana. Perencanaan memerlukan visi yang berorientasi ke depan sebagai kekuatan pendorong dalam mengembangkan potensi dan peningkatan kemampuan. Pendamping sosial bertugas membantu KUBE menetapkan tujuan yang efektif.
- b. Pembimbing. Sebagai pembimbing, pendamping sosial dituntut kemampuan dan keterampilannya untuk mengajak, mengarahkan, dan membina KUBE, sehingga mengerti, memahami, dan melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dan kreatif.
- c. Pemberi informasi. Pendamping sosial memberikan penjelasan tentang gambaran umum program pengentasan kemiskinan, manfaat melakukan aktivitas dengan pendekatan KUBE, cara mengembangkan KUBE, cara mengembangkan keuangan mikro, kerjasama dengan pendamping sosial, menjalin kemitraan, dan sebagainya.
- d. Motivator. Pendamping sosial memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada KUBE, sehingga mereka dapat mengenali masalah dan kekuatan yang dimilikinya. Pendamping sosial dapat memunculkan

partisipasi anggota KUBE, sehingga diharapkan dapat merubah pola pikir, sikap, dan mengembangkan potensinya melalui upaya pemberdayaan.

- e. Fasilitator. Pendamping sosial memberikan berbagai kemudahan, baik berupa barang, peralatan, maupun ketentuan, sehingga KUBE meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan, serta mengatasi berbagai kendala dan masalah.
- f. Evaluator. Pendamping sosial dapat memberikan penilaian, saran, dan masukan kepada KUBE tentang pilihan mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Disamping itu, pendamping sosial juga dapat memberikan penilaian terhadap keseluruhan program guna meningkatkan kualitas program pendampingan.

C. Tinjauan Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan menurut Djohani dalam Anwas (2013:49) menyatakan bahwa suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Menurut Sumodiningrat dan Nugroho (2005:112) pemberdayaan adalah member energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk mandiri, dan kemudian di lepas untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.

Menurut Suharto (2010: 59-60) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

Menurut Sumodiningrat dan Nugroho (2005:120-121) Dalam memberdayakan masyarakat, ada tiga strategi yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sudut pandangnya adalah setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa potensi atau tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*).
2. Memperkuat daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan penyediaan berbagai sarana dan pembukaan akses dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat lebih berdaya.

3. Memberdayakan berarti melindungi. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah merupakan hal yang mendasar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi interaksi, karena ini akan memperlemah daya yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud pemberdayaan adalah proses pemberian kekuasaan kepada masyarakat miskin agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial, kesehatan dan lainnya melalui pembinaan, pendampingan dari pemerintah menuju kearah kemandirian masyarakat itu sendiri.

D. Tinjauan Keluarga Miskin

Dalam konsep Sosiologi menurut Tumanggor (dalam Wulandari 2004:26) menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Selain itu keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggot, mempunyai pembagian tugas dan kerja, seta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Sedangkan Levitan dalam Suyanto (2013:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan- pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Kemiskinan menurut Sumodiningrat dan Nugroho (2005:78) adalah jika dilihat dari propil masyarakat, maka kemiskinan bukan masalah kesejahteraan melainkan mengandung berbagai isian. Pertama, masalah kerentanan

(*vulnerability*).kedua adalah masalah tertutupnya akses ke berbagai peluang sumber daya produktif, termasuk modal, SDA, bahkan kesempatan kerja. Ketiga, masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional, dan sosial dalam menghadapi kekuasaan dalam hal-hal yang menyangkut pembuatan keputusan yang berhubungan dengan dirinya.

Keempat, kemiskinan juga berarti rendahnya ketahanan fisik dan intelektual karena keterbatasan kandungan fisik dan non-fisik. Kelima, Kemiskinan berbentuk ketergantungan, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi pada pihak lain. Keenam, adanya sebuah system nilai “kemiskinan” yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi kemudian disebut sebagai kemiskinan kultural. Menurut Departemen sosial RI (2009:14) Indikator kemiskinan yang menjadi sumber data program pemberdayaan fakir miskin mengacu pada kriteria rumah tangga Fakir miskin yang diterbitkan oleh BPS meliputi sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per-orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama- sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli 1 (satu) pakaian baru dalam satu setahun.
10. Hanya sanggup makan 1 (satu) atau 2 (dua) kali sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 seperti : sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Berdasarkan tingkat kerentanan kemiskinan, maka masalah kemiskinan dapat dibagi menjadi :

1. Hampir Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila memenuhi sebanyak 6 s/d 9 variabel dari indikator diatas.

2. Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila memenuhi sebanyak 9 s/d 12 variabel dari indikator diatas.

3. Sangat Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk sangat miskin/fakir miskin apabila memenuhi sebanyak 12 s/d 14 variabel dari indikator diatas.

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasi masyarakat menurut garis kemiskinan. Di bawah ini penulis menampilkan ciri- ciri kemiskinan menurut Suyanto (2013:5) sebagai berikut :

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.
2. Mereka umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk membeli tanah garapan ataupun modal usaha.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolah kerena harus membantu orang tua mencari nafkah.

4. Banyak diantara mereka yang tinggal di pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali. Umumnya mereka berprofesi sebagai buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian.
5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan. Sedangkan kota di negara berkembang tidak siap menampung urbanisasi.

Dari beberapa uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat miskin adalah masyarakat yang pada umumnya dalam kondisi pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, tinggal di pedesaan, dan kurangnya keterampilan (*skill*) sehingga perlu adanya pengembangan baik fisik maupun non-Fisik seperti nilai, sikap, kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah.

E. Tinjauan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Pembentukan KUBE

Bersumber dari Departement Sosial RI (2005:51) KUBE dibentuk dilandasi oleh nilai filosofi “dari” “oleh” dan “untuk” masyarakat. Artinya keberadaan KUBE di desa atau kota semuanya berasal dari masyarakat. Pembentukannya melibatkan masyarakat setempat dan peruntukkannya juga untuk anggota masyarakat setempat.

Konsep ini dikembangkan dalam pembentukan KUBE agar mampu memasukkan nilai-nilai dan norma budaya setempat, keberadaan sumber-

sumber potensial alam yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan SDM (anggota KUBE)

2. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Sumodinigrat (2009:89) menyatakan KUBE diarahkan kepada upaya mengurangi kemiskinan melalui:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- b. Peningkatan pendapatan atau peningkatan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya.
- c. Pengembangan usaha.
- d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakatsekitar atau meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungannya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya.

3. Kriteria Anggota KUBE adalah :

- a. Penghasilan rendah, sangat miskin.
- b. Ketergantungan pada bantuan pangan
- c. Keterbatasan kepemilikan pakaian
- d. Tidak mampu membiayai pengobatan
- e. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun
- f. Tidak memiliki harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya
- g. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
- h. Sulit memperoleh air bersih.
- i. Sudah Nikah/usia produktif 17 s/d 55 tahun.

4. Jumlah Anggota KUBE

- a. Jumlah anggota KUBE dapat bervariasi, tergantung kebutuhan nyata di lapangan/ situasi dan kondisi lokal dan kesepakatan kelompok itu sendiri..
- b. Jumlah KUBE terdiri dari 5-10 KK.
- c. Karena sifat suatu kegiatan dan kepentingan tertentu, kelompok KUBE terdiri dari kelompok besar (gabungan kelompok kecil) namun pembinaan tetap pada kelompok kecil.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok KUBE

- a. Kedekatan tempat tinggal.
- b. Jenis usaha atau keterampilan usaha.
- c. Ketersediaan sumber/geografis.
- d. Latar belakang hidup budaya.

- e. Memiliki motivasi yang sama.
- f. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat sudah tumbuh.

6. Struktur dan Kepengurusan KUBE

- a. Struktur organisasi suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Siapa mengerjakan apa, “ siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”?
- b. Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut.
- c. Perumusan struktur KUBE terdiri dari : Ketua. Sekretaris dan bendahara.
- d. Kepengurusan dipilih dari hasil musyawarah atau kesepakatan bersama.

7. Kewajiban Anggota

- a. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah disepakati.
- b. Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- c. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
- d. Memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab.

F. Kerangka Pikir

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4. Kesejahteraan umum diwujudkan melalui program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan merata di segala aspek kehidupan bernegara.

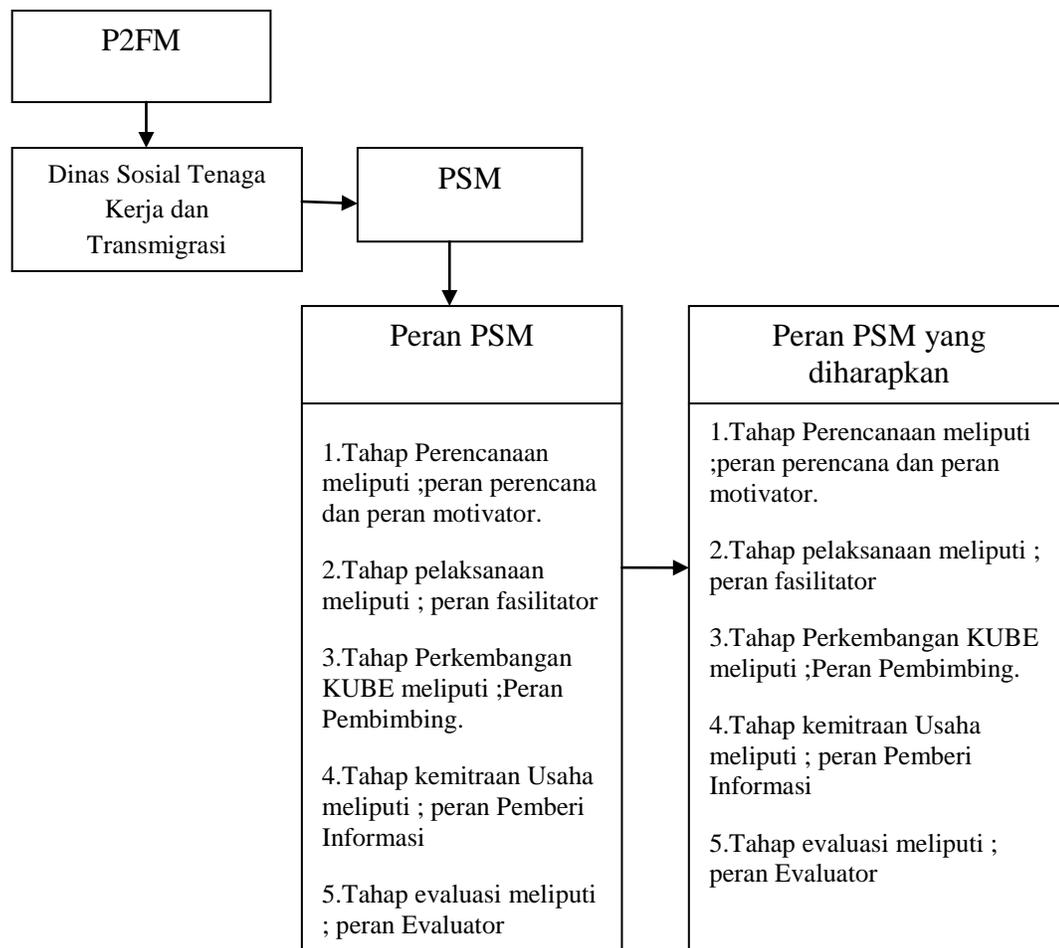
Kesejahteraan dan kemiskinan merupakan dua hal yang berbeda namun saling terkait. Kesejahteraan akan meningkat apabila kemiskinan berkurang sebaliknya jika kemiskinan meningkat maka kesejahteraan masyarakat menurun. Oleh karena itu, dalam mengurangi kemiskinan diperlukan usaha dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial telah merancang dan mengimplementasikan program penanganan kemiskinan. Salah satunya adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha serta mendayagunakan sumber potensi lokal dari aspek ekonomi dan sosial. KUBE akan dikembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan ekonomi pada skala kecil dengan jenis usaha ternak, perikanan, pertanian, industri rumah tangga, jasa dan usaha ekonomi lainnya.

Pelaksanaan Program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE. Pemerintah mempunyai mekanisme pelaksanaan program yaitu adanya Pembina teknis wilayah dengan dukungan anggaran APBD atau sering disebut pekerja sosial masyarakat dengan berfungsi melakukan pendampingan terhadap keluarga miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Departemen Sosial RI (2005:39) menyatakan Pekerja sosial masyarakat dibentuk dan ditentukan oleh ketua Tim Pembina (Bupati/Walikota). Pekerja Sosial berguna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan KUBE agar dapat tumbuh,

berkembang, dan mandiri. Pekerja sosial adalah pemandu yang mempengaruhi segala aktivitas anggota KUBE.

Pemberdayaan yang berkelanjutan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran Keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk berbenah diri dan tidak berputus asa memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Jika pemberdayaan KBS menuai keberhasilan maka selanjutnya dapat diganti dengan masyarakat miskin lainnya melalui program yang sama. Pemberdayaan dilakukan kearahkan pada kesinambungan usaha, yang dapat meningkatkan volume usaha. Dalam skala yang lebih besar, kegiatan KUBE ini juga diarahkan melakukan kemitraan dengan pengusaha yang lebih besar. Keberhasilan dalam mengelola usaha kelompok usaha bersama dihubungkan kearah verifikasi usaha dan usaha simpan pinjam. Pada akhirnya diharapkan tujuan dari KUBE ini akan dapat meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Binaan Sosial (KBS) sebagai keluarga yang mandiri. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka pikir di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir